



Studi Pustaka Model Literasi Keuangan bagi Kelompok Usaha Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penguatan Ekonomi Lokal

Lukman Anthoni¹ Darul Fahmi² Ngatimin³

Pamulang university lecture^{1 2 3}

Email: ¹ lukman.anthoni@gmail.com ¹ darul.bta@gmail.com ² ngatimin77@gmail.com ³

Jurnal: Diterima Pada 02/04/2026, Direvisi Pada 05/04/2026, Diterbitkan Pada 07/04/2026

ABSTRAK

Literasi keuangan merupakan prasyarat penting bagi kelompok usaha masyarakat (misalnya kelompok usaha desa, kelompok subsisten, UMKM binaan, kelompok perempuan, BUMDes/ekosistem desa) untuk mengelola arus kas, mengambil keputusan pembiayaan yang sehat, dan membangun ketahanan usaha. Studi pustaka ini mensintesis kerangka internasional (OECD/INFE) dan kebijakan Indonesia (SNLKI OJK 2021–2025, SNLIK OJK–BPS) untuk merumuskan model literasi keuangan yang aplikatif bagi kelompok usaha masyarakat serta menjelaskan implikasinya terhadap penguatan ekonomi lokal. Metode yang digunakan adalah analisis isi tematik dari dokumen kebijakan, laporan, dan publikasi relevan. Hasil sintesis menunjukkan bahwa model literasi yang efektif bagi kelompok usaha masyarakat perlu menekankan: (1) kompetensi inti berbasis hasil (outcome) seperti pengelolaan kas, perencanaan, risiko, dan keputusan pembiayaan; (2) integrasi literasi dengan inklusi (akses produk/layanan); (3) pendekatan berbasis ekosistem daerah melalui sinergi pemda–TPAKD, program desa, dan dukungan lembaga keuangan; serta (4) mekanisme pendampingan untuk memastikan perubahan perilaku. Studi ini juga mengusulkan indikator evaluasi dari tingkat individu/kelompok hingga dampak ekonomi lokal.

Kata kunci: literasi keuangan; kelompok usaha masyarakat; inklusi keuangan; ekonomi lokal; UMKM; studi pustaka

PENDAHULUAN

Kelompok usaha masyarakat berperan sebagai “mesin ekonomi mikro” di tingkat lokal: menjaga perputaran uang, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat daya tahan ekonomi keluarga. Secara makro, UMKM di Indonesia berjumlah puluhan juta dan berkontribusi besar pada PDB, sekaligus menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, banyak kelompok usaha menghadapi masalah klasik: pencampuran uang usaha-rumah tangga, ketidakjelasan arus kas, keputusan utang yang tidak terukur, hingga ketergantungan pada pembiayaan informal berbunga tinggi. Kondisi ini membuat usaha sulit “naik kelas” dan rapuh saat terjadi guncangan.

Dari sisi kebijakan, Indonesia mengukur kemajuan literasi dan inklusi melalui SNLIK. Hasil SNLIK 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan inklusi 75,02%. Pada 2025, OJK dan BPS melaporkan kenaikan menjadi literasi 66,46% dan inklusi 80,51%. Artinya, akses meningkat, tetapi kebutuhan peningkatan kualitas pemahaman dan perilaku finansial tetap besar, terutama pada segmen usaha mikro dan kelompok rentan.

Studi pustaka ini berfokus pada pertanyaan: model literasi keuangan seperti apa yang paling relevan bagi kelompok usaha masyarakat, dan bagaimana dampaknya dapat menguatkan ekonomi lokal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan library research dengan analisis isi tematik. Sumber utama meliputi:

1. Kerangka OECD/INFE untuk literasi keuangan MSMEs (kompetensi inti dan instrumen pengukuran).
2. Kebijakan dan dokumen strategis Indonesia: SNLKI OJK 2021–2025 serta SNLIK OJK–BPS.
3. Dokumen ekosistem inklusi daerah dan program pendukung: SNKI (Perpres 114/2020), TPAKD, serta inisiatif BI terkait kelompok subsisten dan literasi keuangan digital.

Tahap analisis: (a) ekstraksi konsep kunci → (b) pengelompokan tema (kompetensi, desain program, ekosistem daerah) → (c) penyusunan model konseptual dan indikator dampak → (d) penarikan implikasi untuk penguatan ekonomi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Ruang Lingkup “Kelompok Usaha Masyarakat”

Dalam praktik program pemberdayaan, “kelompok usaha masyarakat” dapat berupa: kelompok usaha mikro berbasis komunitas/desa, kelompok perempuan, kelompok subsisten/berpenghasilan rendah, UMKM binaan, BUMDes yang mengelola unit usaha, atau kelompok produktif dalam program sosial-ekonomi. Pendekatan berbasis kelompok penting karena:

- 1) pembelajaran kolektif lebih mudah dan murah,
- 2) ada kontrol sosial untuk membangun kebiasaan (mis. pencatatan, menabung),
- 3) memudahkan integrasi dengan ekosistem daerah (Pemda, pendamping, lembaga keuangan).

UNDP Indonesia juga menekankan model hub pemberdayaan yang menguatkan pelaku usaha mikro melalui pelatihan keberlanjutan bisnis dan dukungan akses pembiayaan.

B. Kerangka Internasional: Model Kompetensi Literasi Keuangan untuk MSMEs (OECD/INFE)

OECD/INFE menyusun core competencies framework literasi keuangan bagi MSMEs yang bersifat outcome-based dan dapat diadaptasi sesuai konteks negara/industri. Secara ringkas, kompetensi kunci biasanya mencakup kemampuan:

- 1) mengelola uang usaha (kas, pencatatan, pemisahan),
- 2) merencanakan dan menganggarkan,
- 3) memahami produk/jasa keuangan dan memilih secara tepat,
- 4) mengelola risiko (kejadian tak terduga, perlindungan, kontinuitas),
- 5) mengambil keputusan pembiayaan dan investasi usaha.

Untuk evaluasi, OECD/INFE juga menyediakan instrumen survei untuk mengukur literasi keuangan pemilik MSMEs. Ini penting agar program literasi tidak berhenti di “kelas”, tetapi bisa diukur dampaknya secara sistematis.

C. Kerangka Nasional Indonesia: SNLKI dan SNLIK sebagai Fondasi Model

SNLKI 2021–2025 menjadi pedoman strategis literasi keuangan nasional dan menekankan bahwa literasi bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku, serta perlu selaras dengan inklusi (akses). Sementara itu, SNLIK memberi konteks capaian indeks literasi/inklusi nasional dan menjadi dasar perancangan prioritas sasaran.

Di tingkat kebijakan inklusi, Perpres 114/2020 tentang SNKI menegaskan tujuan keuangan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan. Ini memperkuat argumentasi bahwa literasi keuangan yang tepat sasaran dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal.

D. Model Literasi Keuangan Berbasis Kelompok untuk Penguatan Ekonomi Lokal (Hasil Sintesis)

Berangkat dari OECD/INFE + SNLKI + praktik ekosistem daerah, model yang paling realistis untuk kelompok usaha masyarakat adalah Model 5-Lapis (Input–Proses–Output–Outcome–Impact) berikut.

a. Input (Pra-kondisi Program)

Pemetaan baseline: kebiasaan pencatatan, utang, akses rekening, hambatan digital.

Segmentasi kelompok: subsisten/ultra mikro vs mikro berkembang; sektor usaha; level pendidikan.

Mitigasi risiko: literasi penipuan, jebakan utang, dan produk ilegal sebagai materi wajib awal.

b. Proses (Desain Pembelajaran yang “Nempel” ke Praktik)

Modul kompetensi inti (mingguan, praktik langsung) kas & pemisahan uang, pencatatan sederhana & laporan kas, perencanaan/anggaran, utang sehat dan akses pembiayaan formal, manajemen risiko usaha dan dana darurat.

Ini sejalan dengan kompetensi outcome-based OECD/INFE untuk MSMEs.)Pendampingan (coaching) dan tugas bukti “buku kas 14 hari”, rekap mingguan, simulasi keputusan pinjaman. Literatur implementasi di Indonesia menunjukkan pendekatan pendampingan dan ekosistem daerah sering menjadi kunci keberlanjutan perubahan perilaku.

Integrasi digital Mengingat pembayaran digital makin luas pada UMKM (misalnya penggunaan QRIS yang sangat besar pada merchant UMKM), materi literasi perlu memasukkan transaksi digital yang aman dan rapi.

c. Output (Hasil Langsung)

peserta memahami konsep dasar produk/layanan keuangan, kelompok menerapkan pencatatan minimal (kas masuk-keluar), ada aturan pemisahan uang usaha, ada rencana anggaran bulanan sederhana.

d. Outcome (Perubahan Perilaku dan Kinerja Usaha)

arus kas lebih stabil, pengurangan kebocoran modal kerja, keputusan utang lebih rasional (sesuai kapasitas bayar), akses pembiayaan formal meningkat melalui kanal yang lebih aman (mis. program daerah/TPAKD).

e. Impact (Penguatan Ekonomi Lokal)

Ketika banyak kelompok usaha menjalankan praktik keuangan yang sehat, dampaknya menetes ke ekonomi lokal:

- 1) sirkulasi uang di desa/kelurahan lebih stabil (usaha bertahan lebih lama),
- 2) peningkatan kesempatan kerja lokal,

- 3) ketahanan komunitas meningkat saat shock (harga bahan naik, permintaan turun).

OJK juga menekankan peran sinergi program daerah (TPAKD) untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, dan mengaitkan penguatan inklusi dengan perbaikan indikator pembangunan manusia.

E. Peran Ekosistem Daerah: TPAKD, Program Desa, dan Dukungan Institusi

Model berbasis kelompok menjadi jauh lebih efektif jika melekat pada ekosistem daerah:

- 1) TPAKD sebagai wadah sinergi program akses keuangan di daerah.
- 2) Inisiatif BI yang menyiapkan pedoman pengembangan ekonomi & keuangan inklusif berbasis kelompok subsisten, relevan untuk segmen ultra mikro/MBR.
- 3) Akselerasi literasi keuangan digital yang menyasar kelompok prioritas termasuk UMKM dan wilayah 3T melalui inisiatif BI.

Intinya: literasi → harus “ditopang” akses produk yang sesuai, jalur pembiayaan yang aman, dan pendampingan lokal agar perilaku baru bertahan.

F. Indikator Evaluasi (Agar Dampak Bisa Diukur)

Agar riset pustaka ini dapat menjadi acuan penelitian/PKM, indikator bisa dibuat berjenjang:

(1) Level Individu/Anggota Kelompok

skor literasi keuangan UMKM (mengacu instrumen OECD/INFE),
pemahaman produk (rekening, pembiayaan, asuransi sederhana),
pemahaman risiko dan keamanan transaksi.

(2) Level Praktik Kelompok

persentase anggota yang mencatat kas harian,
kepatuhan pemisahan uang usaha–pribadi,
kepatuhan anggaran dan rekonsiliasi mingguan,
penurunan penggunaan pembiayaan informal yang merugikan.

(3) Level Kinerja Usaha

stabilitas arus kas (frekuensi defisit kas menurun),
margin lebih konsisten,

kemampuan membentuk dana cadangan.

(4) Level Ekonomi Lokal

jumlah usaha bertahan (survival usaha) pasca 3–6 bulan,

serapan tenaga kerja lokal pada kelompok,

peningkatan transaksi digital UMKM lokal (indikator adopsi) bila relevan.

G. Kesenjangan Literatur dan Agenda Riset

Beberapa gap yang sering muncul dan layak Anda angkat:

1. Model literasi sering generik, belum spesifik untuk dinamika kelompok usaha (aturan kelompok, kas bersama, pembagian hasil).
2. Integrasi literasi–inklusi: program literasi kadang tidak diikuti jalur akses produk yang aman (rekening, kredit produktif, kanal pembayaran). Padahal SNKI menekankan inklusi sebagai strategi nasional pengurangan kesenjangan.
3. Evaluasi dampak ekonomi lokal: banyak program berhenti pada output (pelatihan selesai), belum mengukur outcome (perilaku) dan impact (ketahanan ekonomi lokal) secara konsisten. Instrumen OECD/INFE dapat membantu standardisasi pengukuran.

KESIMPULAN

Studi pustaka ini menyimpulkan bahwa model literasi keuangan paling relevan bagi kelompok usaha masyarakat adalah model yang berbasis kompetensi inti (outcome-based), terukur, dan terintegrasi dengan ekosistem inklusi daerah. Kerangka OECD/INFE menyediakan peta kompetensi dan instrumen ukur yang kuat untuk MSMEs. Di Indonesia, SNLKI 2021–2025 menegaskan literasi sebagai pengetahuan–sikap–perilaku yang perlu selaras dengan inklusi. Konteks SNLIK menunjukkan capaian literasi/inklusi meningkat, tetapi kebutuhan penguatan kualitas literasi tetap besar, terutama bagi kelompok usaha mikro. Implikasinya terhadap penguatan ekonomi lokal terjadi melalui stabilisasi arus kas, keputusan pembiayaan yang lebih sehat, peningkatan ketahanan usaha, dan dukungan ekosistem daerah (TPAKD dan program inklusi) yang memperluas akses keuangan yang aman.

SARAN

1. Mulai dari kompetensi paling berdampak: pemisahan uang, pencatatan kas, anggaran sederhana, dan utang sehat (bukan teori produk).
2. Wajibkan pendampingan + bukti praktik (logbook 14 hari, rekap mingguan) agar perilaku terbentuk.
3. Integrasikan ekosistem daerah: koordinasi dengan pemda/TPAKD dan akses produk yang sesuai untuk mencegah kembali ke rentan.
4. Sertakan literasi keuangan digital dan keamanan transaksi, mengikuti tren adopsi pembayaran digital di UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2023). Bank Indonesia luncurkan buku pedoman pengembangan ekonomi & keuangan inklusif berbasis kelompok subsisten (Siaran pers).
- Bank Indonesia. (2025). Bank Indonesia inisiasi pengembangan talenta digital untuk tingkatkan literasi keuangan (Siaran pers).
- Kementerian Keuangan RI (DJPb). (n.d.). UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat (artikel/opini berbasis data Kemenkop UKM).
- OECD. (2018). OECD/INFE Core competencies framework on financial literacy for MSMEs. OECD Publishing.
- OECD. (2020). OECD/INFE survey instrument to measure the financial literacy of MSMEs. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2024). Siaran Pers Bersama: Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024 (SNLIK 2024). OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025). Siaran Pers Bersama: Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Sinergi OJK dorong peningkatan inklusi keuangan melalui kemandirian ekonomi desa (Siaran pers/halaman OJK).
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.